

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kolonialisme merupakan salah satu fenomena historis paling berpengaruh dalam membentuk tatanan dunia modern. Kolonialisme yang dilakukan bangsa barat di berbagai benua berawal dari dimulainya penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Portugis dan Spanyol, dimana mereka menemukan wilayah-wilayah baru yang kemudian membuka pintu bagi eksplorasi besar-besaran ke berbagai belahan dunia, termasuk Asia dan Afrika. Kolonialisme terus berkembang hingga pada akhir Perang Dunia I, bangsa Eropa telah menjadikan 85% wilayah di bumi sebagai koloninya (Said, 1978, hlm. 124). Namun sistem kolonial ini mengalami guncangan setelah Perang Dunia II berakhir.

Meskipun Perang Dunia II terjadi di Eropa dan Pasifik-Amerika, namun banyak rakyat di wilayah jajahan yang turut serta dalam perang, baik sebagai prajurit maupun tenaga kerja yang bertugas untuk memenuhi pasokan negara kolonial untuk kebutuhan perang. Dari sinilah tumbuh keinginan kuat dari negara-negara koloni di Asia-Afrika untuk melepaskan diri dari kekuasaan pemerintah kolonial dan memperoleh kedudukan sebagai negara yang merdeka. Ricklefs, dkk, (2013, hlm.518) berpendapat bahwa dengan berakhirnya Perang Dunia II, proses dekolonisasi menjadi semakin jelas terlihat. Setelah perang usai, negara-negara kolonial yang melemah akibat kerugian dan kerusakan selama Perang Dunia II, tidak lagi mampu menahan gelombang tuntutan kemerdekaan yang menyebabkan runtuhnya seluruh imperium kolonial. Hal itu senada dengan pengertian dekolonisasi menurut Jansen (2017, hlm. 1-2) yang dapat diartikan sebagai proses lepasnya legitimasi negara kolonial di suatu wilayah akibat penolakan penduduk pribumi terhadap penindasan yang dilakukannya.

Negara-negara yang baru merdeka pasca perang Dunia II ini kemudian oleh para sejarawan Barat disebut sebagai *the Third World Countries* atau Negara Dunia Ketiga. Istilah *Third World* mencerminkan negara-negara di Asia dan Afrika, negara yang baru saja merdeka dari praktik kolonialisme bangsa Barat dan masih

diselimuti oleh krisis dan konflik dalam maupun luar negeri. Hal ini semakin diperburuk dengan adanya pertarungan ideologi antara Amerika Serikat dengan ideologi liberal-kapitalisnya, dan Uni Soviet dengan komunis-sosialisnya yang disebut sebagai Perang Dingin. Perang untuk memperebutkan kekuasaan dan pengaruh ideologis ini meletus pada akhir tahun 1940an. Pidato Presiden Amerika Serikat, Harry S. Truman pada tanggal 12 Maret 1947 menyatakan bahwa, saat ini dunia telah terbelah menjadi dua (Utama, 2017, hlm. 53). Perang antara Amerika dan Uni Soviet ini berhasil membagi dunia menjadi dua kelompok besar yang mempengaruhi stabilitas politik negara-negara di Dunia, termasuk di Asia dan Afrika.

Perang ideologi ini menjadikan wilayah mereka sebagai medan pertempuran untuk memperluas pengaruh dari ideologi kedua negara adidaya tersebut. Hal ini semakin mempersulit perjuangan bangsa Asia dan Afrika untuk dapat menjadi negara yang merdeka seutuhnya dan memiliki kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri. Terdapat sistem aliansi selama Perang Dingin terjadi, yang mencakup negara-negara anggota blok kapitalis dan blok komunis. Blok kapitalis atau dikenal sebagai blok Barat meliputi Kanada, Italia, Prancis, Turki, dan beberapa negara lainnya yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Sedangkan blok komunis atau blok Timur meliputi China, Mongolia, Polandia, dan negara lainnya, dipimpin oleh Uni Soviet (Wolfers, 1959). Meskipun kedua blok ini tidak berperang secara langsung, namun peperangan terjadi di wilayah-wilayah lain untuk memperebutkan dominasi ideologi politiknya. Sehingga pada perkembangan selanjutnya, wilayah Asia berubah menjadi medan pertempuran selama Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Vietnam, misalnya, setelah berada di bawah kekuasaan kolonial Prancis sejak abad ke-19, Vietnam memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945. Namun Prancis hanya mengakui Vietnam sebagai bagian dari Uni Prancis bersama Laos dan Kamboja. Oleh karena itu timbulah perlawanan rakyat Vietnam yang dipimpin oleh Ho Chi Minh yang kemudian dikenal sebagai Perang Indocina pertama (1946-1954). Menurut Duro'ng (2023, hlm.346-347), skala perang menjadi semakin besar setelah Amerika Serikat yang memandang bahwa Vietnam

merupakan benteng pertahanan agar komunisme tidak menyebar ke wilayah lainnya di Asia Tenggara akhirnya membantu Prancis dalam melakukan perlawanan dengan memasok senjata dan amunisi, sedangkan perlawanan rakyat Vietnam didukung oleh Uni Soviet dan China.

Pada era ini banyak negara-negara yang hidup di bawah ketakutan bahwa perang dapat terjadi kapan saja dan penggunaan senjata nuklir dapat dengan mudah meluluhlantakkan umat manusia (Hobsbawm dalam Utama, 2017, hlm. 51). Melihat ancaman perang akibat dari adanya persaingan ideologi Amerika Serikat dan Uni Soviet pada masa itu, Negara Dunia Ketiga yang baru saja merdeka merasa perlu berbuat sesuatu untuk melepaskan diri dari pengaruh kekuatan negara-negara adidaya dan mengupayakan kemandirian untuk dapat menentukan nasib negaranya sendiri. Negara Dunia Ketiga menjadi kelompok negara yang paling merasakan ketakutan akan timbulnya peperangan, pasalnya negara-negara ini mengetahui bahwa jika perang dengan penggunaan senjata nuklir terjadi, maka negara-negara merekalah yang akan mengalami kekalahan dan kehancuran paling parah.

Pada April 1954, Perdana Menteri Sri Lanka mengirimkan surat kepada Indonesia untuk menghadiri sebuah pertemuan yang juga akan dihadiri oleh Myanmar, India, dan Pakistan. Pertemuan ini akan dilaksanakan di Kolombo, Sri Lanka, akibat adanya kekhawatiran serupa yang dirasakan oleh negara dunia ketiga mengenai perang Indocina yang semakin memanas dan semakin masifnya penggunaan senjata nuklir (Utama, 2017, hlm. 83). Indonesia menyanggupi undangan tersebut serta mengambil kesempatan ini untuk mengemukakan gagasan terkait kerjasama bangsa Asia-Afrika. Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo berangkat menuju Sri Lanka. Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo akhirnya menyampaikan gagasan mengenai Konferensi Asia-Afrika ini dihadapan perdana menteri India, Pakistan, Myanmar, dan Sri Lanka. Namun, para delegasi tampak ragu-ragu mengenai ide konferensi yang akan mengundang negara-negara di Asia dan Afrika itu. Meskipun begitu, usulan ini tetap dimasukkan ke dalam komunikasi akhir Konferensi Kolombo, dimana para perdana menteri setuju jika Indonesia melakukan usaha untuk menyelidiki

kemungkinan diadakannya Konferensi Asia-Afrika (Sastroamidjojo, 1974, hlm.512).

Setelah kelima negara akhirnya setuju untuk mengadakan konferensi ini, pada tanggal 28-29 desember tahun 1954, diselenggarakanlah sebuah pertemuan untuk membahas mengenai agenda Konferensi Asia-Afrika yang dilaksanakan di kota Bogor, yang kemudian dikenal sebagai Konferensi Bogor (Sastroamidjojo, 1974, hlm. 525). Di dalam konferensi ini para perdana menteri banyak terlibat dalam perdebatan, khususnya mengenai persoalan negara-negara yang akan diundang. Namun akhirnya dari Konferensi Bogor ini menghasilkan keputusan mengenai tujuan konferensi, waktu pelaksanaan, negara sponsor, agenda, hingga daftar negara yang akan diundang. Berdasarkan komunikasi bersama Konferensi Bogor (Abdulgani, 1980, hlm.48-53), para perdana menteri memutuskan bahwa Konferensi Asia-Afrika akan diselenggarakan pada bulan April tahun 1955, dengan mengundang 30 negara di Asia-Afrika yang meliputi lima negara sponsor yaitu Indonesia, India, Pakistan, Myanmar, dan Sri Lanka, serta 25 negara di Asia-Afrika.

Pemerintah Indonesia kemudian memutuskan untuk memilih Kota Bandung sebagai tempat pelaksanaan Konferensi Asia-Afrika karena memperhatikan fasilitas keamanan yang memadai serta kondisi geografis yang cocok. Selain itu, waktu pelaksanaannya ditetapkan pada tanggal 18 sampai 23 April, 1955. Lebih dari 2.000 orang hadir dari berbagai belahan dunia di Bandung pada bulan April tahun 1955 itu, yang terdiri dari para delegasi, jurnalis, dan para pengamat internasional (Utama, 2017, hlm. 101). Sejak tanggal 16 April, pesawat yang membawa para delegasi satu persatu tiba di Indonesia, mereka ada yang tiba di Jakarta, yang nantinya perjalanan akan dilanjutkan menggunakan transportasi darat, ada pula yang langsung mendarat di Kota Bandung.

Pada tanggal 18 April 1955, Presiden Soekarno secara resmi membuka acara Konferensi Asia-Afrika melalui pidatonya yang berjudul “*Let A New Asia and A New Africa Be Born!*” [Lahirkanlah Asia Baru Dan Afrika Baru!]. Dalam pidatonya ini, Soekarno menekankan pentingnya persatuan negara-negara Asia dan Afrika dalam menghadapi imperialisme serta menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan damai. Ia menegaskan bahwa konferensi ini bukan sekadar ajang

pertemuan diplomatik, melainkan simbol kebangkitan bangsa-bangsa yang pernah terjajah untuk menentukan masa depan mereka sendiri (dalam Abdulgani, 1980, hlm.190 - 206). Agenda dilanjutkan dengan pidato sambutan dari ketua Konferensi Asia-Afrika, Ali Sastroamidjojo yang kemudian diikuti oleh pidato negara sponsor, dan seluruh ketua delegasi yang hadir. Di hari kedua konferensi, para delegasi yang hadir dibagi ke dalam tiga komite, yaitu komite politik, ekonomi, dan budaya. Komite-komite ini kemudian berangkat menuju gedung Dwi Warna untuk memulai rapat-rapatnya yang akan dilaksanakan secara tertutup.

Topik yang dibahas dalam sidang komite politik berkenaan dengan hak asasi manusia dan hak untuk menentukan nasib sendiri, masalah-masalah bangsa terjajah, dan pemajuan perdamaian dunia dan kerjasama internasional. Namun di dalam sidang komite politik ini terjadi perdebatan sengit antar ketua delegasi terutama terkait masalah komunisme yang dianggap sebagai bentuk baru dari imperialisme dan juga masalah Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Akibat perdebatan ini, Konferensi Asia-Afrika yang semula akan selesai pada hari sabtu, 23 April kemudian perlu diperpanjang selama satu hari. Sehingga pada hari minggu, 24 April, komunike final Konferensi Asia-Afrika dibacakan oleh Roeslan Abdulgani sebagai ketua Sekretariat Bersama dan konferensi pun ditutup oleh pidato dari Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo (Sastroamidjojo, 1974, hlm. 556).

Hasil dari Konferensi Asia-Afrika yang termuat dalam komunike final yaitu mencakup sepuluh nilai dengan tujuan untuk memajukan perdamaian dan kerjasama dunia. Sepuluh nilai ini kemudian dikenal sebagai Dasasila Bandung yang intinya menegaskan pentingnya menghormati kedaulatan dan hak asasi setiap bangsa, termasuk hak untuk merdeka dan menentukan masa depan sendiri (Utama, 2017, hlm.141). Prinsip ini juga menolak segala bentuk penjajahan dan menekankan bahwa konflik internasional harus diselesaikan melalui jalur damai tanpa intervensi dari negara lain. Selain itu, Dasasila Bandung mendorong kerja sama antarnegara Asia dan Afrika dalam berbagai bidang untuk menciptakan keseimbangan global yang lebih adil serta memastikan bahwa hubungan internasional didasarkan pada hukum, keadilan, dan kesetaraan.

Konferensi Asia-Afrika tidak hanya menghasilkan dokumen semata, namun juga dampak nyata dalam tatanan dunia saat itu (Abdulgani, 1980, hlm.158). Dalam bidang politik, Konferensi Asia-Afrika menyebarkan semangat kemerdekaan ke berbagai negara yang masih berada di bawah penjajahan. Dalam waktu sepuluh tahun pasca Konferensi Asia-Afrika, puluhan negara baru lahir. Selain itu, konferensi ini juga membawa angin perubahan ke dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dimana sebanyak 50 negara pascakolonial berhasil menjadi bagian dari forum itu dan menjadi suara mayoritas, dimana mereka kini dapat ikutserta menentukan arah tatanan dunia (Utama, 2017, hlm. xiii). Di bidang sosial-kebudayaan, Konferensi Asia-Afrika mengembangkan arus informasi dan komunikasi antar negara serta menumbuhkan rasa solidaritas di antara negara-negara Asia dan Afrika sebagai wilayah yang kaya akan keberagaman agama dan budaya yang sebelumnya rusak akibat kolonialisme.

Konferensi Asia-Afrika menjadi sorotan dunia karena diselenggarakan pada masa ketika perhatian global terfokus pada dua kekuatan besar, yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dalam situasi tersebut, kemunculan negara-negara yang selama ini dianggap lemah dan kurang berpengaruh di panggung internasional menjadi sesuatu yang mengejutkan. Konferensi ini pun memicu berbagai reaksi, baik dari dalam negeri maupun dari dunia internasional. Di tingkat nasional, dukungan terhadap penyelenggaraan konferensi sangat besar. Utama (2017, hlm. 150) mencatat bahwa mayoritas partai politik di Indonesia menilai Konferensi Asia-Afrika sebagai peristiwa penting untuk memperkuat solidaritas antarbangsa di Asia dan Afrika serta mendorong terciptanya perdamaian dunia.

Pandangan partai politik di Indonesia tercermin dalam media massa yang memiliki afiliasi langsung dengan mereka. Media massa dari berbagai latar ideologis, mulai dari *Harian Rakjat* yang dekat dengan partai komunis, *Sinpo* yang merupakan surat kabar etnis Tionghoa di Indonesia, hingga *Hikmah* yang bernuansa Islam, umumnya menunjukkan kebanggaan atas keberhasilan konferensi. Surat Kabar *Sinpo* bahkan menyebutkan bahwa dimulainya Konferensi Asia-Afrika sebagai hari yang sangat bersejarah, melalui surat kabarnya yang bertajuk “*Zaman Baru Dari Sedjarahnja Rakjat Asia-Afrika Memantiar Dari Bandung*” (*Sinpo*, 18

April 1955). Meski demikian, beberapa oposisi pemerintah, melalui surat kabar *Indonesia Raya* juga mengangkat isu kontroversial mengenai keberadaan wanita pendamping bagi para delegasi. Meskipun isu tersebut cukup menimbulkan polemik hingga menjadi *headlines*, namun semangat nasionalisme dan kebanggaan terhadap keberhasilan Konferensi Asia-Afrika tetap kuat dan tidak tergoyahkan begitu saja.

Sementara itu, tanggapan dunia internasional terhadap Konferensi Asia-Afrika 1955 sangat luas dan beragam. Respon dari berbagai negara di Asia dan Afrika seperti *The Hindustan Times*, *The Pakistan Times*, hingga *The Tribune*, menyoroti konferensi ini sebagai peristiwa penting yang menghasilkan semangat solidaritas Asia-Afrika untuk mencapai perdamaian dunia. *The Tribune* Ambala, India, menyebutkan bahwa “*Bandung is a quest for ways and means to live in freedom and in pursuit of the progressive wellbeing of all*”, kalimat ini menggambarkan Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955 sebagai suatu pencarian atau usaha bersama untuk menemukan cara dan jalan hidup dalam kebebasan, serta mengejar kesejahteraan bagi semua orang (*The Tribune* Ambala, 25 April 1955). Selain India, negara-negara lain di Asia dan Afrika, khususnya yang menjadi peserta Konferensi Asia-Afrika 1955 memiliki pandangan yang positif dan mendukung pertemuan ini.

Perbedaan pandangan ditemui dalam surat kabar negara-negara Barat, seperti Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat yang cenderung memberikan respon yang negatif dengan narasinya yang sinis dan meremehkan. *Herald Tribune* Paris memuat pandangan William Humpreys yang menyoroti bahwa Nehru, setelah menghabiskan waktu sepuluh hari bersama para pemimpin Partai Komunis Tiongkok, memanfaatkan konferensi untuk menyuarakan perdamaian sebagai cara memperluas pengaruhnya di Asia (Wright, 2020, hlm.87-88). Tidak sedikit pihak Barat yang mencurigai adanya agenda tersembunyi bernuansa komunisme dalam pelaksanaan konferensi ini. Selain itu, sikap meremehkan juga tampak dari pandangan beberapa negara Barat terhadap para pemimpin dan negara peserta, yang sebagian besar merupakan negara bekas koloni.

Sebaliknya, Uni Soviet dan negara-negara berideologi sosialis-komunis, seperti Austria dan Jerman Timur, menyambut konferensi ini sebagai langkah penting dalam gerakan anti-imperialisme yang selaras dengan nilai-nilai sosialis-komunis. Seperti pernyataan yang diberikan oleh perwakilan dari negara bagian Uni Soviet, Kirgistan yang dimuat dalam surat kabar *Pravda* berikut.

Atas nama rakyat Republik Sosialis Soviet Kirgistan, saya dengan hangat menyambut para peserta Konferensi Negara-Negara Asia dan Afrika. 3-7 tahun yang lalu, rakyat Kirgistan terbelenggu penindasan kolonial, kehilangan hak pilih, dan ditakdirkan untuk hidup dalam kemiskinan dan kepunahan. Kini, rakyat Kirgistan yang merdeka menjadi bagian dari keluarga besar rakyat Soviet yang bahagia dan setara, yang berhasil mengembangkan ekonomi dan budaya nasionalnya. Rakyat Kirgistan berharap konferensi ini akan mendorong pembangunan negara-negara Asia dan Afrika yang damai dan mandiri, serta perluasan kerja sama ekonomi dan budaya di antara mereka demi memperkuat perdamaian antarbangsa. Saya dengan tulus mendoakan Anda semua agar berhasil dan sukses dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi konferensi. (*Pravda*, 19 April 1955, hlm. 1).

Pernyataan ini menunjukkan bagaimana Uni Soviet memanfaatkan momentum konferensi untuk memperluas pengaruh ideologisnya, dengan menempatkan pengalaman negara-negara sosialis sebagai model keberhasilan pascakolonial.

Respon dari berbagai pihak ini disampaikan baik melalui siaran radio maupun media massa seperti surat kabar pada khususnya. Surat kabar merupakan salah satu alat penyebaran informasi yang paling banyak digunakan pada masa itu. Menurut Zoest (dalam Sobur, 2001, hlm. 60), sebuah teks memiliki kapasitas untuk melakukan manipulasi pembaca yang mengarah ke suatu ideologi. Oleh karena itu, media massa memuat pesan-pesan yang tidak pernah lepas dari muatan ideologis yang berpihak pada kepentingan kelompok tertentu, terutama mereka yang berada dalam posisi kekuasaan. Dalam perkembangannya, surat kabar maupun media massa lainnya memiliki kedekatan dengan politik dan pemerintahan. McQuail berpendapat bahwa selalu ada hubungan yang dekat antara media massa dan politik di rezim mana pun. Hal ini membuat media massa bersifat tidak netral. Hal ini juga senada dengan pendapat Stuart Hall (dalam Sobur, 2001, hlm.40) bahwa ‘media massa pada dasarnya tidak mereproduksi, melainkan menentukan realitas melalui

penggunaan kata-kata yang terpilih'. Hubungan antara media massa dan politik terjalin dari kepentingan dalam menyajikan realitas kepada pembaca.

Salah satu bentuk media yang paling tua dan berpengaruh adalah surat kabar, yang muncul dengan bentuk paling sederhananya di Jerman pada tahun 1609 (Permana dkk., 2020, hlm. 4). Surat kabar menjadi sarana utama penyebaran informasi kepada publik dan memegang peran penting dalam pembentukan opini masyarakat. Sebelum hadirnya televisi dan internet, surat kabar adalah media utama yang dijadikan rujukan dalam memahami peristiwa sosial-politik, baik di tingkat lokal maupun global. Dalam konteks Konferensi Asia-Afrika tahun 1955, surat kabar memiliki posisi strategis sebagai medium informasi yang mampu menjangkau khalayak luas sekaligus membentuk persepsi publik. Perannya dapat dianalogikan seperti media sosial saat ini, yakni sebagai ruang pertempuran wacana yang sangat menentukan arah opini publik.

Misalnya, *The New York Times* dari Amerika Serikat, yang dicetuskan oleh Henry J. Raymond dan George Jones pada tahun 1851 (Davis, 1921, hlm. 3). *The New York Times* dan Pers di Amerika Serikat pada umumnya memiliki karakteristik yang bebas, independen, dan beragam, dengan jurnalis yang berperan penting sebagai pengawas terhadap kebijakan pemerintah. Kebebasan pers dijamin dalam Amandemen Pertama Konstitusi AS, yang melarang pemerintah untuk memberlakukan sensor atau membatasi publikasi secara sewenang-wenang. Namun, meskipun kebebasan pers secara hukum dilindungi, tekanan terhadap media tetap bisa terjadi dalam situasi-situasi tertentu seperti saat Perang Dunia II maupun Perang Dingin.

Di sisi lain, *Pravda* yang pertama kali diterbitkan di St. Petersburg atas inisiatif Vladimir I. Lenin pada tahun 1912 (Hollander, 1967, hlm.1). Sebagai surat kabar utama Partai Komunis Uni Soviet, *Pravda* berfungsi sebagai alat politik negara yang berfungsi untuk menyebarluaskan ideologi komunis dan membentuk opini publik yang sejalan dengan kepentingan politik nasional. Hal ini mencirikan karakteristik utama dari pers Soviet Komunis adalah bahwa media menjadi salah satu instrumen partai penguasa. Pers tidak hanya berfungsi sebagai saluran

informasi, tetapi juga sebagai alat ideologis yang aktif dalam menjaga dominasi partai dan sistem sosialis (Ruspranto, 2015, hlm.98).

Untuk memahami bagaimana media massa membentuk konstruksi atas suatu peristiwa sejarah, pendekatan *news* and *views* menjadi penting untuk diterapkan. Melalui pendekatan ini, kita dapat mengenali dan memahami karakteristik wacana yang dominan pada suatu zaman (Suwirta, 2015, hlm. xv). Pendekatan *news* and *views* memungkinkan analisis terhadap dua aspek utama, pertama, *news*, yang menyoroti isi pemberitaan sebagai representasi langsung atas realitas peristiwa, dan kedua, *views*, yang mencakup pandangan editorial media baik melalui tajuk rencana, catatan pojok, maupun karikatur yang memuat opini, interpretasi, serta sikap ideologis media terhadap peristiwa tersebut. Dengan demikian, pemilihan surat kabar sebagai objek kajian dalam memahami sejarah menjadi relevan, mengingat surat kabar memiliki peran yang strategis dalam membentuk opini publik dan merepresentasikan kepentingan ideologis suatu negara.

Kajian mengenai Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 telah banyak dilakukan dan menjadi objek penelitian lintas disiplin, mulai dari sejarah, politik, hubungan internasional, hingga studi media dan jurnalistik. Richard Wright menulis buku *The Color Curtain* pada tahun 1956, ia fokus pada isu kolonial dan rasial dalam perhelatan Konferensi Asia-Afrika, terutama respon dari sudut pandang dunia Barat. Kemudian, Wildan Sena Utama melakukan penelitian yang dituangkan dalam buku *Konferensi Asia-Afrika 1955: Asal-usul Intelektual dan Warisannya bagi Gerakan Global Antiimperialisme* pada tahun 2017. Ia menekankan sejarah intelektual Konferensi Asia-Afrika serta dampaknya bagi gerakan anti-imperialisme global. Serupa dengan Wildan Sena Utama, Armen Aghazarian dalam tesisnya yang berjudul “*We the Peoples of Asia and Africa: The Bandung Conference and the Southernisation of the United Nations, 1955–1970*” pada tahun 2012 juga menempatkan KAA sebagai peristiwa penting dalam transformasi tatanan global pasca-Perang Dunia II, seperti mendorong *southernisation* Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan pembentukan Gerakan Non Blok.

Pada bidang Media dan Jurnalistik, terdapat skripsi karya Rachel Grace Serepina (2015) yang berjudul “*Pemberitaan Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika 2015 Di Media Cetak (Analisis Framing Pan Dan Kosicki Terhadap Majalah Tempo Edisi Khusus 60 Tahun Konferensi Asia Afrika, Tanggal 20-26 April 2015)*”. Skripsi ini meneliti bagaimana Majalah Tempo membingkai pemberitaan mengenai Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) dengan menggunakan model analisis *framing* dari Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Selain itu, skripsi karya Fikri Abdul Muiz yang berjudul “*Peran Surat Kabar Merdeka Dalam Perhelatan Konferensi Asia-Afrika di Bandung Tahun 1955*” pada tahun 2024. Skripsi ini mengkaji peran Surat Kabar Merdeka dalam menyampaikan narasi perjuangan dan dukungan terhadap perhelatan Konferensi Asia-Afrika 1955, dengan menggunakan metode penelitian sejarah dan teori *agenda setting* serta pendekatan *framing* model Pan dan Kosicki. Penelitian ini menekankan bagaimana media nasionalis seperti Surat Kabar Merdeka membentuk opini publik dan mengonstruksi makna nasionalisme serta solidaritas Asia-Afrika dalam bingkai narasi berita.

Namun, kajian-kajian yang telah membahas Konferensi Asia-Afrika 1955 hingga saat ini belum secara eksplisit mengupas perbandingan konstruksi wacana media dari dua blok ideologi utama selama Perang Dingin, yakni kapitalisme yang diwakili Amerika Serikat dan komunisme yang diwakili Uni Soviet. Padahal, Konferensi Asia-Afrika tidak hanya mempengaruhi hubungan solidaritas bangsa Asia-Afrika, tetapi juga mempengaruhi pertarungan ideologi antara dua kekuatan adidaya. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan membandingkan pemberitaan media massa Amerika Serikat (*The New York Times*) dan Uni Soviet (*Pravda*) terhadap Konferensi Asia-Afrika 1955, dengan menggunakan metode penelitian sejarah dan pendekatan *news and views*. Dengan demikian, penelitian ini memungkinkan penelusuran terhadap bagaimana kedua media membingkai peristiwa yang sama dengan sudut pandang dan respons yang berbeda-beda (Suwirta, 2015, hlm. xi). Lebih jauh, kajian ini tidak hanya memperkaya pemahaman tentang sejarah Konferensi Asia-Afrika, tetapi juga turut berkontribusi dalam pengembangan studi media dalam penulisan sejarah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penelitian ini berfokus pada bagaimana pandangan media massa Amerika Serikat dan Uni Soviet memandang Konferensi Asia-Afrika tahun 1955. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah dan profil surat kabar *The New York Times* dan *Pravda*?
2. Bagaimana pemberitaan *The New York Times* dan *Pravda* terhadap KAA 1955?
3. Bagaimana pandangan *The New York Times* dan *Pravda* terhadap KAA 1955?
4. Bagaimana perbandingan pemberitaan dan pandangan *The New York Times* dan *Pravda* terhadap KAA 1955?

1.3 Tujuan

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan menjadi pertanyaan penelitian di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui sejarah dan profil surat kabar media massa Amerika Serikat (*The New York Times*) dan Uni Soviet (*Pravda*);
2. Menganalisis pemberitaan *The New York Times* dan *Pravda* terhadap Konferensi Asia-Afrika 1955;
3. Menganalisis pandangan *The New York Times* dan *Pravda* terhadap Konferensi Asia-Afrika 1955;
4. Menganalisis persamaan dan perbedaan pandangan *The New York Times* dan *Pravda* Terhadap Konferensi Asia-Afrika 1955.

1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah penulisan sejarah mengenai Konferensi Asia-Afrika tahun 1955. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut yang membahas aspek lain dari

Konferensi Asia-Afrika sehingga kajian mengenai peristiwa ini menjadi semakin komprehensif dan mendalam.

1.4.2 Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan peneliti mengenai Konferensi Asia-Afrika dari berbagai perspektif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analisis historis guna meningkatkan kualitas penulisan sejarah penulis.

b) Bagi Sekolah

Penelitian ini dapat berkontribusi dalam memperkaya pemahaman peserta didik dan tenaga pendidik mengenai Konferensi Asia-Afrika, baik dalam konteks sejarah lokal mengenai Kota Bandung, sejarah nasional mengenai Indonesia masa demokrasi liberal/parlementer, maupun sejarah internasional yang berhubungan dengan peristiwa Perang Dingin. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran sejarah yang lebih kontekstual di sekolah-sekolah di Indonesia dan membangkitkan semangat nasionalisme peserta didik.

c) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia guna menjadi rujukan dalam menyusun narasi diplomasi dalam rangka mengamalkan nilai-nilai Konferensi Asia-Afrika ke dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Museum Konferensi Asia-Afrika guna menambah wawasan pemanduan di museum serta dalam rangka memperingati 70 tahun Konferensi Asia-Afrika.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini disusun dalam lima bab yang saling berkesinambungan untuk menganalisis bagaimana pandangan *The New York Times* sebagai media Amerika Serikat dan *Pravda* sebagai media massa Uni Soviet terhadap Konferensi Asia-Afrika tahun 1955. Sumber yang digunakan berupa kedua surat kabar tersebut yang berada di rentang terbitan 17-25 April 1955. Selain itu, untuk surat kabar *The New*

York Times yang digunakan yaitu surat kabar harian, peneliti tidak melakukan analisis terhadap surat kabar mingguannya. Selain itu, penelitian ini akan disusun ke dalam bab I, dimana peneliti akan dipaparkan unsur-unsur pendahuluan, seperti latar belakang penelitian, merumuskan masalah penelitian, serta menguraikan tujuan dan manfaat penelitian baik dari segi teoritis maupun praktis.

Di bab II yang membahas mengenai tinjauan pustaka, seperti mengkaji konsep-konsep teoretis yang menjadi dasar analisis. Konsep dekolonisasi dibahas sebagai latar historis yang melatarbelakangi penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika, sementara Perang Dingin menjadi kerangka geopolitik yang memengaruhi arah pemberitaan media pada masa tersebut. Bagian ini juga menelaah bagaimana Konferensi Asia-Afrika telah dikaji dalam berbagai literatur sejarah, baik dari perspektif nasional maupun internasional. Selain itu, pembahasan mengenai surat kabar sebagai medium penyebaran informasi dan pembentuk opini publik menjadi bagian penting dalam memahami bagaimana media membingkai peristiwa. Tak luput juga pembahasan mengenai *News and Views* yang penting untuk menelusuri pandangan media massa terhadap peristiwa. Selain itu, bagian ini juga memuat penelitian terdahulu yang telah dilakukan.

Pada bab III akan dipaparkan metode penelitian, yang mencakup pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian sejarah, yang terdiri dari tiga tahapan utama seperti yang dirancang oleh Helius Sjamsuddin. Tahap pertama yaitu heuristik, yakni tahap pengumpulan sumber primer dan sekunder yang relevan, termasuk arsip surat kabar *The New York Times* dan *Pravda*. Tahap kedua yaitu kritik sumber, yang mencakup kritik eksternal dan internal terhadap keabsahan dan kredibilitas sumber. Tahap terakhir yaitu historiografi, yakni penyusunan hasil penelitian dalam bentuk narasi ilmiah.

Kemudian pada bab IV, akan berisi hasil dan pembahasan yang merupakan bagian inti dari penelitian yang menyajikan hasil analisis terhadap isi surat kabar yang diteliti. Pembahasan dibagi ke dalam empat bagian utama, pertama akan membahas mengenai sejarah dan profil dari kedua media massa. Kedua, akan membahas mengenai pemberitaan kedua media massa tersebut. Ketiga, membahas tentang pandangan media massa yang terkandung dalam pemberitaan dalam kedua

media massa. Serta terakhir, akan membahas mengenai persamaan dan perbedaan pandangan dari kedua media massa dalam melihat Konferensi Asia-Afrika 1955.

Terakhir, bab V, akan berisi simpulan dan saran, merangkum temuan utama dari penelitian ini dengan menekankan bagaimana The New York Times dan Pravda memandang Konferensi Asia-Afrika secara berbeda sesuai dengan latar ideologi dan kepentingan politik masing-masing negara. Bab ini juga menyampaikan saran untuk penelitian lebih lanjut, terutama dalam memperluas kajian mengenai sejarah dan representasi Konferensi Asia-Afrika dalam berbagai media internasional.